

The Impact of Patent Waiver on COVID-19 Vaccines to the Developing and Least-Developed Countries Under the WTO Framework

Anabel Milenia Anindhita Manulang,¹ Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This legal research aims to (1) understand the regulatory aspect of patent waiver under the WTO framework; (2) identify the positive and/or negative aspects of the patent waiver on COVID-19 vaccines towards developing and least-developed countries; and (3) provide recommendations about what shall be done next by the Government of Indonesia with the current progress of the TRIPS waiver proposal.

This legal research uses a normative approach or doctrinal research with the support of interviews to answer the research questions. Therefore, the materials used in the endeavour to answer the relevant research questions were WTO agreements, case laws, official documents, scholarly writings, and theories. Moreover, this legal research uses the descriptive method, in which the author describes and analyzes data to uncover facts. Furthermore, the collected data are analyzed qualitatively.

The result of the legal research finds that, *first*, the regulatory aspect of patent waiver according to the WTO framework is set out under Article IX of the WTO Agreement and Section 5 of the TRIPS Agreement. *Second*, there are positive and negative impacts of the patent waiver on COVID-19 vaccines to the developing and least-developed countries. Patent waiver on COVID-19 vaccines may significantly impact developing and least-developed countries with no capacity to develop their own vaccines. *Lastly*, some actions need to be done next by the Government of Indonesia with the current progress of the TRIPS waiver proposal.

Keywords: Patent Waiver, COVID-19 Vaccines, Developing and Least-Developed Countries, WTO Framework.

¹ Student at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S-1 Reguler 2018).

² Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Dampak Pengabaian Paten Pada Vaksin COVID-19 Terhadap Negara Berkembang dan Kurang Berkembang Berdasarkan Kerangka WTO

Anabel Milenia Anindhita Manulang,¹ Irna Nurhayati²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk (1) memahami aspek regulasi pengabaian paten dalam kerangka WTO; (2) mengidentifikasi aspek positif dan/atau negatif dari pengabaian paten pada vaksin COVID-19 terhadap negara berkembang dan kurang berkembang; dan (3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan proposal pengabaian TRIPS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau penelitian doctrinal dibantu dengan kegiatan wawancara untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu, bahan-bahan yang digunakan dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah adalah perjanjian WTO, kasus hukum, dokumen resmi, tulisan akademik, dan teori. Selain itu, penelitian hukum ini menggunakan metode deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data untuk mengungkap fakta. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penulisan hukum menemukan bahwa, pertama, aspek regulasi pengabaian paten dalam kerangka WTO diatur dalam Pasal IX:3 Perjanjian WTO dan Bagian 5 Perjanjian TRIPS. Kedua, terdapat dampak positif dan negatif dari pengabaian paten pada vaksin COVID-19 ke negara berkembang dan kurang berkembang. Pengabaian paten pada vaksin COVID-19 dapat secara signifikan pada negara berkembang dan kurang berkembang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan vaksin sendiri. Terakhir, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan bagi Pemerintah Indonesia terkait dengan progres proposal pengabaian TRIPS saat ini.

Kata kunci: Pengabaian Paten, Vaksin COVID-19, Negara Berkembang dan Kurang Berkembang, Kerangka WTO.

¹ Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (S-1 Reguler 2018).

² Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.